

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERWAWASAN  
LINGKUNGAN KOTA PADANG TAHUN 2019-2024**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:**

**MUHAMMAD IVAN DIAS  
1810012111145**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**No Reg : 11/Skripsi/HTN/FH/VII-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI  
No.Reg : 11/Skripsi/HTN/FH/VII-2022**

Nama : MUHAMMAD IVAN DIAS  
Nomor : 1810012111145  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan  
Kota Padang Tahun 2019-2024

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No.Reg : 11/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : MUHAMMAD IVAN DIAS  
Nomor : 1810012111145  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan  
Kota Padang Tahun 2019-2024

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada hari Rabu  
Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan  
LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Ketua)
2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Anggota)
3. Nurbeti, S.H.,M.H. (Anggota)

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

## **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN KOTA PADANG TAHUN 2019-2024**

Muhammad Ivan Dias<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H, M.H<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum<sup>1</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: [muhammadivandias@gmail.com](mailto:muhammadivandias@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pariwisata merupakan salah satu sumber cadangan devisa negara. Pengelolaan pariwisata di Indonesia mulai dari wisata alam dan wisata budaya yang merupakan salah satu karakteristiknya. Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam Pasal 1 angka 3. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah mekanisme yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang? 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang? 3) Apa sajakah upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan Hukum Sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian : 1) Mekanisme yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang sudah sesuai dengan komponen yang harus dipenuhi dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. 2) Kendala-kendala yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang adalah Sumber daya manusia belum optimal, Anggaran belum menunjang kinerja sektor pariwisata, Kebijakan Pemerintah belum optimal 3) upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok binaan Dinas Pariwisata serta bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup untuk mengembangkan suatu daerah menjadi objek wisata, serta meminta bantuan dari pusat.

**Kata Kunci: Pembangunan, Pariwisata, Berwawasan Lingkungan**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya serta bimbingan, kekuatan lahir dan bathin, yang memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan berjudul **“PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN KOTA PADANG TAHUN 2019-2024”**. Penulisan skripsi ini diselsaikan dalam rangka untuk mencapai gelas Sarjana Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H.,M.H.**, Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulis skripsi ini dapat terselsaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum** Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak **Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.** Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
4. Tenaga Didik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulisan penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua Orang tua saya Bapak Adrin Dias S.P, dan Ibu Yenni Permata Sari serta keluarga yang selalu support , doa serta kasih sayang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang, Juli 2022

Penulis

Muhammad Ivan Dias  
1810012111145

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
1. Tinjauan Umum tentang Rencana Strategis .....	11
a. Pengertian Rencana Strategis .....	11
b. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis.....	14
c. Proses Rencana Strategis.....	15
2. Tinjauan Umum tentang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	18
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	18
b. Strategi dan Arah Kebijakan .....	20
3. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata Berwawasan Lingkungan.....	22
a. Pengertian Pariwisata.....	22
b. Pengertian Pariwisata Berwawasan Lingkungan .....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
1. Mekanisme yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang .....	27
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang .....	34

3. Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang ..... 40

**BAB IV PENUTUP ..... 50**

1. Simpulan..... 50

2. Saran..... 51

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu sumber cadangan devisa negara.<sup>1</sup> Pengelolaan pariwisata di Indonesia mulai dari wisata alam dan wisata budaya yang merupakan salah satu karakteristiknya. Beraneka ragam bentuk alam dan budaya yang menjadikan daya tarik pengunjung terhadap wisata.<sup>2</sup> Potensi tersebut merupakan aset yang harus dimanfaatkan secara optimal melalui kepariwisataan.

Pemerintah memiliki peranan yang sangat sentral pengelolaan dan pengembangannya. Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri.

Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 1 angka 3 pengertian Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikandaya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Wisata*, Yogyakarta: Media Gerbang Aksara, 2016, hlm. 12

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 14

<sup>3</sup> Musanef, *Manajemen Pariwisata di Indonesia*, Jakarta: Gunung Harta, 2006, hlm. 4.

Secara geografis Kota Padang terletak di pesisir pantai barat pulau Sumatera dengan garis pantai sepanjang 84 km. Luas keseluruhan Kota Padang adalah 694,96 km<sup>2</sup>, dan lebih dari 60% dari luas tersebut, sekitar  $\pm$  434,63 km<sup>2</sup> merupakan daerah perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sementara selebihnya merupakan daerah efektif perkotaan. Sedangkan keadaan topografi kota ini bervariasi, 49,48% luas wilayah daratan Kota Padang berada pada wilayah kemiringan lebih dari 40% dan 23,57% berada pada wilayah kemiringan landai.<sup>4</sup> Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatra Barat mempunyai luas wilayah administratif sekitar 1.414,96 km<sup>2</sup>.<sup>5</sup>

Kondisi morfologi tersebut menjadikan Kota Padang memiliki potensi alam dan potensi budaya yang bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata di Sumatera Barat. Potensi alam yang dimiliki seperti kondisi pantai yang indah, masyarakat yang ramah, kuliner dan potensi budaya yang dimiliki. Namun keberadaan pariwisata ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat Kota Padang dalam hal ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Padang dari tahun 2019 ke tahun 2020 dimana pada tahun 2020, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota padang adalah sebanyak 2,5 juta wisatawan *domestic* dan 21 ribu wisatawan mancanegara. Penjelasan berikut dengan tabel Jumlah wisatawan Kota Padang Tahun 2019-2020 :

---

<sup>4</sup> Basis Data Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.com, *Profil Kota Padang*, <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/81> (diakses tanggal 18 Oktober 2021 Pukul 17.43)

<sup>5</sup>Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.co.id., *Jurnal Kepariwisata Indonesia, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, (E-ISSN 2685-9076; P-ISSN 1907-9419 Volume 4, Nomor 12 ). <http://ejournal.kememparekraf.go.id/index.php/jki> (diakses tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 19.24)

**TABEL 1**  
**Jumlah Wisatawan Kota Padang Tahun 2019-2020**

Tahun	Domestik	Mancanegara
2019	5,38 Juta	88 ribu
2020	2,56 Juta	21 ribu

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang

Dari kunjungan wisatawan tersebut, besarnya Pendapat Asli Daerah (Selanjutnya disebut PAD) yang didapat oleh kota Padang mencapai Rp 74 Milyar.<sup>6</sup> Data PAD Sektor Pariwisata Kota Padang setiap tahun dapat terlihat, bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2015 PAD sektor pariwisata hanya Rp. 17.83 Milyar namun dalam 1 periode (5 tahun) meningkat tajam menjadi Rp. 139,74 milyar di tahun 2019 atau meningkat sebesar 591,28% dalam satu periode (5 tahun).<sup>7</sup> Berikut penjelasan rincian melalui tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Kota Padang :<sup>8</sup>

**TABEL 2**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Kota Padang (Milyar)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Kota Padang (Milyar)	
2015	17,83
2016	22,64
2017	35,96
2018	39,25
2019	43,89

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang

Kontribusi PAD sektor pariwisata ini terhadap realisasi PAD total juga meningkat setiap tahun, dimana pada tahun 2015 kontribusi PAD Sektor Pariwisata

<sup>6</sup> BPS.co.id., *Ringkasan APBD Pendapatan Kabupaten Kota Se-Sumatera Barat*, <https://sumbar.bps.go.id/indicator/13/324/1/ringkasan-apbd-pendapatan-kabupaten-kota-se-sumatera-barat.html> (diakses tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 20.43)

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

baru 4,82% dan mengalami peningkatan cukup tinggi setiap tahun dan realiasi PAD secara total juga meningkat. Pada tahun 2019 kontribusi PAD sektor pariwisata mencapai 19,20% dari total PAD Kota Padang.<sup>9</sup>

Namun demikian, Kota Padang dinilai masih belum maksimal dalam menggarap potensi pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Perlu dilakukan pengembangan terhadap objek wisata yang ada di Kota Padang baik yang berwawasan lingkungan melalui pengelolaan wisata kota Padang sehingga bisa menjadi sektor andalan dimasa datang. Pembangunan pariwisata akan memberikan berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari pembangunan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat memunculkan kegiatan ekonomi di daerah dan merangsang pertumbuhan kebudayaan asli Indonesia.<sup>10</sup> Akan tetapi ada juga dampak negatif dari pengembangan pariwisata yang kurang dianalisis efeknya, seperti pencemaran lingkungan, perubahan norma sosial, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan serta adanya perubahan keaslian kualitas keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Sejumlah indikator lain juga diterapkan dalam perkembangan pariwisata seperti :<sup>11</sup>

- a. *policy support* (prioritas pariwisata, daya saing harga, keterbukaan regional, environment sustainability),

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Fandeli, *Pengertian dan Kerangka Dasar Kepariwisataaan Pengertian*, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm. 12.

<sup>11</sup> Afifah Nur Millatina, Peran Pemerintah Untuk Menumbuhkan Potensi Pembangunan Pariwisata Halal Di Indonesia, Vol. 5 No.1 Juni 2019.

<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/JMBI/article/view/2587/2056> (Diakses 2 Mei 2022)

- b. *tourism enabler* (lingkungan bisnis, keamanan, kebersihan dan kesehatan, Sumber Daya Manusia dan tenaga kerja, kesiapan teknologi informasi),
- c. *infrastructure* (infrastruktur pelabuhan dan darat, infrastruktur pelayanan pariwisata, infrastruktur bandara,) dan
- d. *natural/ cultural resources* (sumber daya alam dan sumber daya budaya)

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun. Rencana strategis daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5 Ayat (2) bahwa perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis. Aktivitas rencana strategis mengubah bentuk dari rencana statis menjadi sebuah sistem yang menyediakan kinerja strategi dan memberikan umpan balik untuk pengambilan keputusan serta memungkinkan rencana bisa terlibat dan tumbuh sebagai persyaratan dan perubahan keadaan lainnya.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019–2024 ini disusun dengan maksud untuk dipahami dan dipedomani oleh berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan kebudayaan dan industri pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung, fisik maupun non fisik tentang gambaran pembangunan pariwisata Kota Padang dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang disusun berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Kota Padang tahun 2019 -2024.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Pasal 2 Ayat (1), yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dalam melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Belum efektifnya regulasi dalam rangka efektifitas pengembangan dan pengendalian pembangunan pariwisata. Berkenaan dengan itu otonomi daerah dalam pelaksanaan pembangunan dituntut adanya peraturan terhadap fungsi pelaksanaan secara optimal pada pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang merupakan hal penting dalam mengembangkan kemampuan untuk menyusun rencana kerja sebagai landasan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Padang di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN KOTA PADANG TAHUN 2019-2024”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang?

3. Apa sajakah upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa mekanisme yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data primer dimana data yang diperoleh langsung berdasarkan kenyataan hukum yang ada di masyarakat.<sup>12</sup>

#### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan untuk mendapatkan data primer adalah:

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 52

- a. Data Primer adalah data diperoleh peneliti berdasarkan hasil observasi lapangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah permasalahan yang menjadi objek penelitian.<sup>13</sup> Peneliti mendapatkan data primer secara langsung melalui subjek penelitian.
- b. Data Sekunder adalah diperoleh peneliti dari hasil studi pustaka dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, teori hukum dan putusan pengadilan<sup>14</sup> yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm .43

<sup>14</sup> Yulianto Achamd dan Mukti Fajar, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm 42.



4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang 2004-2020;
6. Peraturan Walikota Padang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung penjelasan dari primer, seperti hasil penelitian dan seterusnya.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, yang berkaitan dengan judul penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

### a. Studi dokumen

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Raja Grafindo, 2015, hlm.21

b. Wawancara

Studi wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal, teknik wawancara dengan narasumber Bapak Diko Eka selaku Putra Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Kota Padang.

### 3. Analisa Data

Teknis analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>16</sup> Teknis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu metode dengan cara kualifikasi dan perbandingan terkait dengan permasalahan yang diteliti kemudian data tersebut dianalisis guna memperoleh kesimpulan sebagai jawaban permasalahan penelitian. Selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu penjabaran untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>17</sup> Kemudian akan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga dapat diperoleh data deskriptif analisis.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 183

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.12.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Umum Rencana Strategis**

##### **a. Pengertian Rencana Strategis**

Perencanaan Strategis adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.<sup>18</sup> Perencanaan strategis lebih merupakan perencanaan jangka pendek ke menengah daripada jangka panjang. Perencanaan strategis berkaitan dengan proses peganggaran dalam arti menjelaskan tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

Menurut Kerzner perencanaan strategis (*strategic planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Menurut Lorange, perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan dengan kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah

---

<sup>18</sup> Arini Permata Sari, *Analisa Konsep Perencanaan Strategis*, Jurnal Volume 2 Nomor IX Tahun 2017. <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/viewFile/27/8> (Diakses Tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 21.04)

perusahaan, sehingga apabila strategic planning tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka itu adalah kegagalan<sup>19</sup>

Proses perencanaan strategis menurut Hunger dan Wheelen meliputi empat elemen dasar, yaitu: <sup>20</sup>

1. Pengamatan,
2. Perumusan strategi,
3. Implementasi strategi, dan
4. Evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaannya

Berikut ini beberapa alasan pentingnya Renstra bagi sebuah organisasi:<sup>21</sup>

1. Memberikan kerangka dasar bagi perencanaan perencanaan lainnya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur.
2. Renstra membantu suatu organisasi untuk berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi yang efektif.
3. Menciptakan prioritas
4. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan.
5. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan.
6. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi.
7. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif.

---

<sup>19</sup> Harmony blog, Rencana strategis, <https://www.harmony.co.id/blog/rencana-strategis-pengertian-konsep-dan-tahapan-penerapannya>, diakses pada tanggal 29 juni 2022, pukul 22:22

<sup>20</sup> Rusniati dan Ahsanul Haq, *Perencanaan Strategis Dalam Perspektif Organisasi*, Tahun XIV, No. 2, Nopember 2014 : 102 - 209.  
file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/skripsi%20ivan/178-333-1-10-20150227.pdf

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 4

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain: <sup>22</sup>

- a. Akuntabilitas yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.
- b. Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya.
- c. Ketaatan pada hukum dalam artian seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten.
- d. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Penerapan prinsip-prinsip “good governance” dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama oleh karena masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah. Disisi lain pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif, disebabkan oleh karena belum diterapkannya sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan program program disuatu instansi pemerintah.

---

<sup>22</sup> Zuchri Abdussamad, Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, <https://media.neliti.com/media/publications/113565-ID-strategi-pemerintah-daerah-dalam-meningk.pdf> (diakses tanggal 18 Februari 2022)

## **b. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis**

### **1. Maksud Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019–2024 ini disusun dengan maksud untuk dipahami dan dipedomani oleh berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan kebudayaan dan industri pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berupa fisik maupun non fisik, tentang gambaran pembangunan pariwisata Kota Padang dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.<sup>23</sup>

### **2. Tujuan Rencana Strategis**

Tujuan penyusunan rencana strategis adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Renstra Kota Padang sebagai berikut: <sup>24</sup>

- a. Menetapkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang;
- b. Menetapkan rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang;
- c. Menyediakan instrumen bagi pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang;
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan

---

<sup>23</sup> Laporan Rencana Strategis Kota Padang Tahun 2019-2024. hlm. 28

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 31

- e. Terciptanya konsistensi pembangunan yang terintegrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara program Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

### **c. Proses Rencana Strategis**

Dalam perencanaan strategis, diperlukan beberapa proses pelaksanaan yang akan diuraikan sebagai berikut: <sup>25</sup>

#### **a. Identifikasi Posisi Strategis**

Saat mengidentifikasi posisi strategis, ingatlah bahwa tujuan harus realistis dan terukur. Gunakan misi, visi, dan budaya kerja di perusahaan untuk mempermudah identifikasi posisi.

#### **b. Kumpulkan Orang dan Informasi**

Setelah menetapkan posisi strategis data dan informasi yang akan digunakan akurat sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dalam membuat keputusan.

#### **c. Lakukan Analisis SWOT**

Analisis SWOT sering digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bisnis, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin muncul untuk mengembangkan tujuan baru yang akan membantu bisnis menghadapi segala kemungkinan dengan cara yang lebih positif.

#### **d. Merumuskan Rencana Strategis**

Saat mengembangkan rencana, pertimbangkan aspek apa yang akan berdampak terbesar dan yang paling membantu meningkatkan posisi.

---

<sup>25</sup> Arini Permata Sari, *Op.cit.*hlm.3

e. Jalankan Rencana Strategis

Membuat semua orang yang terlibat dan membagikan tugas di antara individu atau divisi. Luangkan waktu untuk memeriksa apakah individu atau divisi telah bekerja dengan benar.

Sementara menurut John M Bryson, ada langkah dalam perencanaan strategis yang meliputi:<sup>26</sup>

1. *Initiate and agree on a strategic planning process* (Memprakarsai dan Menyetujui Suatu Proses Perencanaan Strategis). Tujuan langkah pertama adalah menegosiasikan kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat keputusan (*decision makers*) atau pembentuk opini (*opinion leaders*) internal dan eksternal tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan yang terpenting.
2. *Identify mandates* (Memperjelas Mandat). Mengidentifikasi mandat organisasi untuk memperjelas arti mandat yang diberikan otoritas eksternal baik formal maupun informal yang harus dilaksanakan meliputi; persyaratan-persyaratan, batasan- batasan, harapan, tekanan yang dihadapi.
3. *Identify the strategic issues facing* (Mengidentifikasi Isu Strategis yang dihadapi). Tujuan dari identifikasi isu strategis adalah untuk mengidentifikasi pilihan kebijakan pokok yang akan dilakukan organisasi.

---

<sup>26</sup> Adi Kurnia, *Op.cit.*, hlm.6



4. *Formulate strategies to manage the issues* (Merumuskan Strategi Untuk Mengelola Isu-Isu). Merumuskan strategi untuk mengelola isu tersebut. Rumusan strategi yang efektif serta implementasinya merupakan proses untuk menghubungkan keinginan, pilihan tindakan dan konsekuensi tindakan.
5. *Review and adopt the strategies or strategic plan* (Meriview Dan Menagadopsi Strategi Dan Rencana Strategi). Menyetujui strategi dan rencana untuk mempermudah para pengambil keputusan sehingga saat dilaksanakan dapat berjalan efektif dan merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu.
6. *Establish an effective organization vision* *Establish An Effective Vision* (Menciptakan Visi yang Efektif untuk Masa Depan). Menyusun suatu visi gambaran tentang keberhasilan organisasi jika menerapkan strategi yang telah ditetapkan.
7. *Develop an effective implementation process* (Mengembangkan Proses Implementasi). Mengembangkan proses implementasi yang efektif dalam rangka merealisasikan strategi-strategi yang telah dikembangkan.
8. *Reassess the strategies and the strategic planning process* (Menilai Kembali Strategi dan Proses Perencanaan Strategis). Menilai kembali strategi dan proses perencanaan strategis merupakan penilaian yang diperlukan dalam perencanaan berikutnya.

## **2. Tinjauan Umum tentang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

### **a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pariwisata dan bidang kebudayaan dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Namun demikian,

keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari seberapa besar kompleksitas organisasi dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

1. Analisis gambaran pariwisata Sumatera Barat
2. Analisis permasalahan
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran pariwisata berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target pariwisata; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan pariwisata serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mencakup hal – hal sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Spesialisasi kegiatan baik berupa tugas individu maupun tugas kelompok dalam kedinasan dan mengelompokkan tugas-tugas tersebut ke dalam unit kerja.
- 2) Standarisasi kegiatan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja yang digunakan dalam kedinasan.
- 3) Sentralisasi dan desentralisasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan.

---

<sup>27</sup> Laporan Rencana Strategis Kota Padang Tahun 2019-2024. *Op.cit.*, hlm. 21.

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:<sup>28</sup>

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan Merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan; dan
- k. Kesatuan.

## **b. Strategi dan Arah Kebijakan**

### **1. Strategi**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra adalah strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka

---

<sup>28</sup><https://text-id.123dok.com/document/lzg303dnq-asas-fungsi-dan-tujuan-prinsip-penyelenggaraan-kepariwisataan-pembangunan-kepariwisataan.html> (diakses pada tanggal 20 juli 2022 pada pukul 12.50)

menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai unit kerja Pemerintah Kota Padang memiliki strategi pembangunan pariwisata dan budaya meliputi: <sup>29</sup>

1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata;
2. Meningkatkan pelestarian seni dan kebudayaan lokal/ Minangkabau;
3. Meningkatnya pelestarian Bangunan Cagar Budaya dan daya tarik museum;
4. Meningkatnya promosi dan event pariwisata;
5. Meningkatnya pembinaan industri pariwisata halal; dan
6. Terwujudnya potensi wisata baru.

## **2. Arah Kebijakan**

Pelaksanakan strategi tersebut di atas diperlukan arah kebijakan pembangunan pariwisata Kota Padang yang meliputi :<sup>30</sup>

1. Meningkatkan Pemeliharaan Objek Wisata;
2. Meningkatkan pembinaan Pokdarwis;
3. Meningkatkan keamanan terpadu objek wisata;
4. Meningkatkan sarana prasarana di objek wisata;
5. Meningkatnya pemahaman dan kecintaan terhadap seni budaya local;
6. Meningkatkan pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap benda cagar budaya;

---

<sup>29</sup>Laporan Rencana Strategis Kota Padang Tahun 2019-2024. *Op.cit* hlm. 22

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 25

7. Meningkatkan pengawasan terhadap benda cagar budaya;
8. Meningkatkan koleksi Museum Kota Padang;
9. Meningkatkan Pelaksanaan expo dan publikasi pariwisata;
10. Meningkatkan perencanaan kepariwisataan;
11. Meningkatkan Regulasi kepariwisataan; dan
12. Meningkatkan pembinaan Pelaku Usaha industri Pariwisata halal dan berdaya saing.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata Berwawasan Lingkungan**

#### **a. Pengertian Pariwisata**

Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain.<sup>31</sup> Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah ataupun masyarakat agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan.

Ciri-ciri pariwisata melakukan perjalanan ditentukan oleh keinginan yang mendorong seseorang untuk bepergian ke daerah yang akan dituju yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Berupa perjalanan keliling yang kembali lagi ke tempat asal.
- 2) Pelaku perjalanan hanya tinggal untuk sementara waktu.
- 3) Perjalanan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
- 4) Ada organisasi atau orang yang mengatur perjalanan tersebut.
- 5) Terdapat unsur-unsur produk wisata.

---

<sup>31</sup> Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Pariwisata*, Yogyakarta: Andi, 1997, hlm. 10

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 15

- 6) Ada tujuan yang ingin dicapai dari perjalanan wisata tersebut.
- 7) Biaya perjalanan diperoleh dari negara asal.
- 8) Dilakukan dengan santai.

Tujuan Pariwisata adalah langkah awal dari perencanaan agar ketika kegiatan dilaksanakan bisa sesuai dengan apa yang diinginkan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Keinginan bersantai
- 2) Keinginan mencari suasana lain
- 3) Memenuhi rasa ingin tahu
- 4) Keinginan berpetualang

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

1. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
4. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
5. Memberdayakan masyarakat setempat;

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 17

6. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
7. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **b. Pengertian Pariwisata Berwawasan Lingkungan (Ekowisata)**

Pariwisata Berwawasan Lingkungan adalah merupakan salah satu kegiatan pariwisata dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.<sup>34</sup> Pariwisata berbasis alam juga dapat mempromosikan perlindungan jangka panjang yang lebih efektif dan pengelolaan sumber daya alam. Menurut WTO atau World Trade Organization mendefinisikan ekowisata sebagai sebuah bentuk pariwisata dengan beberapa karakteristik yaitu:

1. Semua bentuk pariwisata yang menggunakan sumber daya alam dengan tujuan utama pengunjung adalah kegiatan observasi dan apresiasi terhadap lingkungan alam dan budaya tradisional yang berlaku di lingkungan tersebut.
2. Secara umum dikelola oleh kelompok kecil yang memiliki keahlian khusus dan bisnis lokal berskala kecil.

---

<sup>34</sup> Sunawan, *Kebijakan Pembangunan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul*, Volume 1, Nomor 9 Tahun 2009. <http://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/42/38> (Diakses Tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 21.26)



3. Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan alam dan sosial dan budaya
4. Mendukung perlindungan wilayah alami dengan meningkatkan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal, organisasi, dan pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan konservasi wilayah alami.

Dalam portofolio produk wisata Indonesia, wisata alam menempati posisi kedua setelah wisata budaya, di mana dalam wisata alam ini ada wisata bahari, ekowisata, dan wisata petualangan. Pariwisata di Indonesia tumbuh dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam tiga tahun terakhir sumbangan pariwisata terhadap devisa negara terus meningkat dan bahkan melampaui yang ditargetkan pemerintah. Di tahun 2019, target devisa dari pariwisata adalah Rp.213 triliun dan tercapai Rp.235.71 triliun (capaian 122,02% dari target).<sup>35</sup>

Demikian juga di tahun 2017 dan 2018 capaian devisa dari pariwisata melebihi yang ditargetkan pemerintah. Pariwisata juga berkontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional. Jika di tahun 2017 sumbangan pariwisata terhadap PDB nasional sebesar 4,25%, maka di tahun 2018 meningkat menjadi 6%. Selain itu, pariwisata juga memberi sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja, baik tenaga kerja langsung, tidak langsung, ataupun ikutan dari kegiatan pariwisata. Setiap tahun terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata.

Berbagai produk wisata seperti wisata religius, wisata konvensi, wisata alam, dan lainnya. Peluang ini sudah di dukung oleh adanya pergeseran pasar dari pola konsumsi massal ke wisata yang minat khusus dan berwawasan lingkungan. Pada

---

<sup>35</sup> BPS.go.id. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/03/1711/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-desember-2019-mencapai-1-38-juta-kunjungan.html#:~:text=Selama%20tahun%202019%2C%20jumlah%20kunjungan,berjumlah%2015%2C81%20juta%20kunjungan>. (diakses tanggal 26 Mei 2022)

sisi lain yang menjadi skala prioritas adalah mendorong peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata.<sup>36</sup>

Apabila hal ini terealisasi, maka masa depan pariwisata akan memiliki daya saing ekonomi yang lebih baik dan memiliki posisi yang sejajar dengan pergaulan pariwisata internasional. Apalagi diperkuat dengan kombinasi bisnis modern, maka pariwisata tidak hanya mampu mempertahankan pasar tetapi, memelihara peluang dalam meningkatkan penetrasi pasar pariwisata akibat liberalisasi jasa.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Diko Eka Putra Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Kota Padang pada tanggal 6 April 2022

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Mekanisme yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam Melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang**

Pengelolaan pariwisata harus merupakan pengelolaan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural. Peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelolapariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri.

Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Padang berdasarkan wawancara dengan Bapak Diko Eka Putra selaku Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Kota Padang yaitu :<sup>37</sup>

1. Meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembangunan serta pembenahan yang dilakukan bertujuan untuk mempercantik kota sehingga berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan. Pengembangan dan pembenahan infrastruktur dilakukan pada sejumlah destinasi populer seperti :

---

<sup>37</sup>Wawancara pada tanggal 6 April 2022

a. Destinasi Pantai Aie Manih

1. Pelebaran akses jalan masuk (betonisasi) disepanjang perempatan jalan menuju gerbang masuk objek wisata pantai air manis selebar  $\pm 1$  M kiri dan kanan jalan
2. Pembuatan area parkir di area tanah pemko padang
3. Pembuatan pedestrian taman dan jalan serta lampu penerangan
4. Lanjutan betonisasi jalan menuju bibir pantai air manis

b. Destinasi Jembatan Siti Nurbaya

1. Perbaiki lampu penerangan
2. Perbaiki jalan dengan melakukan pengaspalan ulang

c. Destinasi Pantai Caroline

1. Pembuatan pedestrian taman dan lampu penerangan
2. Pelebaran akses jalan masuk destinasi

2. Memaksimalkan Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis).

Pokdarwis merupakan *community based tourism* yang bertujuan Mengelola Destinasi yang asetnya merupakan milik kelompok, ulayat atau individu masyarakat, Mengajak masyarakat sekitar destinasi untuk terlibat dan mengangkat kearifan lokal, dan memberikan manfaat langsung pada masyarakat. Dengan terbentuknya pokdarwis pada setiap destinasi di Kota Padang akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan Sapta Pesona, sehingga akan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Tahun 2020 sudah terbentuk 22 pokdarwis di Kota Padang.

3. Mengadakan pertemuan pentahelix bertujuan menjaring aspirasi dari instansi terkait, kalangan stake holder pariwisata, akademisi, media, dan masyarakat dalam rangka membahas permasalahan perkembangan dunia pariwisata serta solusi yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Padang.
4. Memaksimalkan promosi wisata melalui media cetak, elektronik dan khususnya pemanfaatan media sosial. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk menyebarkan informasi pariwisata pada masa pandemi mempunyai peranan yang sangat penting dalam promosi wisata, masyarakat dapat melakukan perjalanan wisata secara virtual.
5. Pelaksanaan Program CHSE (Clean, Healthy, Safety, Environment Sustainability ). Program CHSE (Clean, Health, Safety &Environment) atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan adalah upaya mendorong pelaku seni silat tradisi, pelaku ekonomi kreatif dan pelaku industri pariwisata termasuk hotel dan restoran serta masyarakat yang sehari harinya berusaha di destinasi wisata untuk melakukan dan menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE. CHSE berfungsi sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

Seluruh kegiatan pembangunan dalam perspektif pariwisata akan dapat dijadikan atau disinergikan dengan kegiatan pariwisata. Pariwisata sebagai suatu sistem dapat disinergikan dengan kegiatan apapun termasuk kegiatan ekonomi kerakyatan bahkan dengan kehidupan sehari-hari di desa atau dusun yang paling terpencil sekalipun. Tujuan utama dari kegiatan pariwisata yang

dilakukan adalah untuk memperoleh kesenangan atau menghilangkan perasaan tertekan karena rutinitas kerja. Pada kondisi ini perolehan kepuasan dari kegiatan yang dilakukan wisatawan menjadi sangat penting.

Pembangunan pariwisata dapat memberikan peluang Bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Kota layak huni yang sehat tergantung pada lingkungan yang sehat, ekonomi yang kuat dan penciptaan lapangan kerja yang cukup.<sup>38</sup> Kota yang berkelanjutan adalah salah satu yang mampu menyediakan kebutuhan dasar penduduk dengan infrastruktur yang diperlukan yaitu fasilitas sipil, kesehatan dan perawatan medis, perumahan, pendidikan, transportasi, pekerjaan dan tata pemerintahan yang baik untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Pembangunan berkelanjutan lebih mengacu pada proses dari pada titik akhir. Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang menjamin bahwa keuntungan yang optimal akan diperoleh secara berkelanjutan, hanya dapat diwujudkan dengan pendekatan (kebijakan) yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Pembangunan kepariwisataan harus dapat menyebabkan wisatawan kembali ke rumah dengan membawa memori yang indah tentang destinasi pariwisata atau daya tarik wisata karena telah mengajarkan sesuatu yang berharga bagi wisatawan (selain memperoleh keuntungan ekonomi).

Potensi wisata alam dan budaya pada satu kawasan dikembangkan dalam upaya mensinergikan berbagai kepentingan sebagaimana makna dari suatu kawasan merupakan keterpaduan penegelolaan yang memiliki nilai promosi yaitu *one stop*

---

<sup>38</sup> Arief Setijawan. Jurnal Planoeath PWK FT UMM "Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Sosial Ekonomi. Jurnal Planoeath" ISSN 2615-4226 Vol. 3 No. 1, Februari 2018, hal. 7-11

*service*, intinya pada suatu tempat dapat diberikan pelayanan dari berbagai jasa usaha pariwisata dan dapat menikmati berbagai sajian terpadu untuk tercapainya optimalisasi aset kepariwisataan dan kebudayaan sebagai langkah pemberdayaan masyarakat, menuju kepada pendekatan penting *Community Based Tourism*.

Perencanaan tersebut memuat penataan ruangnya, perhitungan daya dukungnya (daya dukung ekologis, daya dukung fisik, dan daya dukung sosial), studi AMDALnya, pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan, serta peran dan tanggung jawab dari setiap *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, perlu ada penetapan kuota pengunjung didasarkan perhitungan daya dukung dan menambah atraksi untuk meningkatkan lama kunjungan wisata. Dalam pengembangan pariwisata ada 4 komponen yang harus dipenuhi yaitu;

1. Attractions (atraksi) adalah daya tarik yang ditawarkan dari suatu kawasan pariwisata, seperti keindahan alam, kebudayaan daerah, dan lain-lain.
2. Accessibilities (aksesibilitas) merupakan akses transportasi yang tersedia menuju dan di dalam kawasan pariwisata, seperti adanya jalur penerbangan, kereta, bus, atau kapal menuju kawasan pariwisata. Selain itu di dalam kawasan juga tersedia moda transportasi yang dapat digunakan wisatawan untuk menuju objek wisata yang tersedia dalam kawasan pariwisata tersebut.
3. Amenities (amenitas atau fasilitas) merupakan akomodasi yang tersedia di kawasan pariwisata seperti adanya tempat penginapan (hotel, homestay, hostel, dll), rumah makan, fasilitas kesehatan, tempat penjualan souvenir, tempat hiburan, tempat pengolahan sampah/ limbah, listrik, air bersih, dll.

4. Ancillary Services merupakan organisasi kepariwisataan yang dibutuhkan untuk pelayanan wisatawan, seperti asosiasi perhotelan, asosiasi pemandu wisata, asosiasi biro perjalanan, dll.

Dalam pengembangan pariwisata tersebut ada tiga bidang pokok yang dipengaruhi, yaitu kondisi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup dari kawasan wisata. Harapannya pengembangan pariwisata akan berdampak positif tidak hanya terhadap pembangunan ekonomi (peningkatan pendapatan), tetapi juga terhadap kondisi sosial budaya (kesejahteraan masyarakat meningkat dengan kelestarian budaya tetap terjaga) dan kondisi lingkungan (kelestarian lingkungan terjaga). Untuk itulah pengembangan pariwisata yang berkelanjutan diperlukan.

Konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) diadopsi dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang pertama diperkenalkan oleh WCED (*World Commission on Environment and Development*) di Brundtland Report tahun 1987 yaitu bentuk pariwisata yang selaras dengan alam dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, di mana antara kedua belah pihak yaitu tuan rumah dan tamu saling menikmati dan saling berbagi pengalaman baru di antara mereka.

Ada tiga komponen yang harus dipenuhi dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu berkelanjutan secara lingkungan, berkelanjutan secara ekonomi, dan berkelanjutan secara sosial budaya. Berkelanjutan secara lingkungan dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya lingkungan secara optimal melalui pembatasan sumber daya, mempertahankan proses ekologi, dan menjaga kelestarian serta keberadaan warisan alam dan keanekaragaman hayati pada destinasi wisata<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Nur Fadisa. Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pada Kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau Di Kota Bukittinggi. ISSN: 2775-



Kebijakan ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Padang, berdasarkan wawancara dengan Bapak Diko Eka Putra selaku Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Kota Padang kebijakan tersebut antara lain:<sup>40</sup>

1. Menjadikan pariwisata sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Menjadikan pariwisata Daerah sebagai pendorong pembangunan
3. Meningkatkan ketangguhan kepariwisataan Daerah
4. Peningkatan SDM dalam bidang kepariwisataan
5. Peningkatan kerjasama lintas sektoral
6. Peningkatan kemitraan masyarakat, swasta dan dunia pers.

Apabila pariwisata dipandang sebagai alat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, harus ada kesepakatan antara ketiga kelompok diatas, apa yang dapat dipertahankan serta tujuan yang jelas untuk mencapai hal tersebut. Kebijakan Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Daerah merupakan kebijakan dalam pembangunan yang berdimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup dengan landasan keadilan tidak hanya untuk generasi saat ini tetapi juga generasi masa yang akan datang.

Konsep ini muncul akibat dari perkembangan ekonomi dan berbagai dampaknya. Untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan umumnya mewakili pemikiran:

- (1) kepedulian pembangunan berkelanjutan, dengan berbagai tantangannya,

(2) perhatian dengan dampak industri pariwisata. Untuk itu pariwisata dipandang sebagai suatu sistem yang saling terkait dan saling berinteraksi. Dibutuhkan sinergi kebijakan dengan pendekatan multisektor dan multidisiplin.<sup>41</sup>

## **2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang**

Kualitas pelayanan pemerintah umumnya kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan dan KKN.

Suatu pantangan dalam pengembangan pariwisata adalah wisatawan merasa jera yang berakibat keengganan wisatawan untuk kembali. Timbulnya rasa jera paling sering disebabkan oleh ketidak jujuran pengelola termasuk masyarakat dilokasi pariwisata. Sejelek apapun kondisi infrastruktur jika disampaikan sejak awal dengan jujur tidak akan berdampak pada rasa senang atau puas, hal ini terutama untuk wisatawan dari negara maju.

Faktor-Faktor yang menghambat strategi pemerintah daerah dalam memajukan daerah pariwisata Kota Padang menurut Bapak Diko Eka Putra Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Kota Padang yaitu :<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan). Yogyakarta: Gajahmada University Press.

<sup>42</sup> Wawancara pada tanggal 6 April 2022

1. Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi merupakan asset yang mutlak diperlukan, arti penting sumber daya manusia dalam suatu organisasi adalah manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam suatu organisasi. Mereka membuat tujuan organisasi, melakukan inovasi serta berusaha mencapai tujuan tersebut. Tanpa orang-orang berkualitas tampaknya mustahil bagi organisasi untuk meraih tujuan- tujuannya. Sehingga perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang bagus, manajemen sumber daya manusia adalah suatu manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur manajemen sumber daya manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja fokus yang manajemen sumber daya manusia ini hanya masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.
2. Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata daerah Sumatera Barat. Anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, sehingga perlu adanya penambahan anggaran pada Dinas Pariwisata guna menunjang kinerja sektor pariwisata.

Keterlibatan stakeholder dan masyarakat. Kebutuhan dasar pelaku wisata tersebut, maka dapat dipetakan mengenai peranan pemangku kepentingan dan pemain kunci dalam pariwisata di destinasi. Pemain kunci tersebut yaitu pengusaha, masyarakat/komunitas, pemerintah, media dan academia.

- a. Pelaku wisata: yaitu pengunjung atau wisatawan destinasi terdiri dari wisatawan (tourist) dan pelancong yang berperan sebagai konsumen;
  - b. Pengusaha atau sector swasta: yaitu penyedia jasa yang dibutuhkan oleh pelaku wisata, baik yang terkait langsung dengan pariwisata maupun jasa;
  - c. Masyarakat/komunitas: yang berada di destinasi pariwisata yang bertindak sebagai tuan rumah dan garda terdepan dalam melaksanakan sapta pesona;
  - d. Pemerintah: yaitu pihak pemerintah dimana destinasi itu berada dalam batas administrasinya, bisa pemerintah daerah maupun pusat;
  - e. Media: yaitu pihak-pihak yang berperan sebagai perantara atau saluran bagi kelancaran komunikasi antar pemangku kepentingan;
  - f. Akademia: yaitu institusi atau perseorangan yang berperan dalam melakukan penelitian dan penyediaan sumber daya manusia, baik terkait langsung dengan kepariwisataan maupun yang tidak terkait secara langsung;
3. Kebijakan Pemerintah

Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. pemerintah adalah melaksanakan pembangunan disegala bidang, mulai dari pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pemerintah adalah “eksekutor pembangunan” sebagai salah satu upaya untuk

mentransformasi kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dan lebih produktif.

Sektor pariwisata di Kota Padang merupakan sektor unggulan dan prioritas pembangunan Kota Padang. Pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan program unggulan menjadi acuan dalam pengembangan kepariwisataan di Kota Padang. Namun hal ini, tidak terlepas dari beberapa permasalahan utama (Strategic Issued) antara lain :<sup>43</sup>

- a. Belum maksimalnya kegiatan pelestarian kekayaan budaya baik yang tangible dan intangible;
- b. Masih lemahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya dan produk daerah, antara lain karena kurangnya informasi;
- c. Masih lemahnya peta dan sistem informasi kekayaan budaya berupa peta budaya dan dokumen arsip daerah;
- d. Krisis nilai budaya/jati diri (identitas) daerah, nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahmataman, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas daerah, makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme;
- e. Masih belum optimalnya implementasi pembangunan berwawasan kebudayaan, tidak mempunyai bangsa Indonesia mengadopsi budaya global yang lebih relevan bagi upaya pembangunan bangsa dan karakter bangsa. Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan bangsa telah mengakibatkan krisis budaya yang selanjutnya memperlemah ketahanan budaya;

---

<sup>43</sup> PPID.go.id. [https://ppid.padang.go.id/uploads/audios/ppidpadang\\_60c01f0ae1632.pdf](https://ppid.padang.go.id/uploads/audios/ppidpadang_60c01f0ae1632.pdf) (diakses pada tanggal 28 Mei 2022)

- f. Lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata khususnya dalam pengemasan daya tarik wisata ke dalam produk pariwisata;
- g. Belum optimalnya implementasi pedoman, standar, prosedur dan kriteria di bidang pariwisata karena keterbatasan sumber daya di daerah;
- h. Keterlibatan masyarakat dalam pariwisata belum maksimal khususnya di sekitar dayatarik wisata dan kawasan wisata;
- i. Belum efektifnya upaya pemasaran dalam dan luar negeri;
- j. Terbatasnya sarana/materi promosi pemasaran untuk mendukung pelaksanaan pemasaran dan promosi;
- k. Koordinasi dan keterpaduan pemasaran antar “stakeholder” masih lemah;
- l. Sumberdaya pemasaran yang masih terbatas;
- m. Kompetensi dan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan agar mampu melaksanakan program secara optima dengan kompetensi pelayanan publik yang tinggi;
- n. Database Kebudayaan dan Pariwisata yang tersedia belum mampu mendukung kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan sektor Kebudayaan dan Pariwisata yang aktual.

Potensi wisata alam dan budaya berbasis pada pengembangan kawasan secara terpadu. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh para pegawai pemerintahan untuk memecahkan masalah. Kebijakan tersebut perlu dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan dipatuhi seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Namun kebijakan yang disusun tidak akan berdampak jika tidak dilaksanakan.

Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan, implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini.

Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur discounting. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan. Untuk mewujudkan ini harus dilakukan *good corporate governance* usaha pariwisata yaitu transparansi, fase *governance structure*, proses dan *governance outcome* sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi pariwisata. Kedua, memanfaatkan peluang usaha pariwisata yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

### **3. Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang**

Pariwisata dan kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung mempunyai keterkaitan khususnya masyarakat yang menggantungkan pendapatan melalui pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Diko Eka Putra sebagai Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Kota Padang upaya

yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan :<sup>44</sup>

1. Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang mengatasi sumber daya manusia belum optimal dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan dengan membuka lapangan kerja bagi penduduk lokal di bidang pariwisata seperti : tour guide, waiter, bell boy, dan lain-lain.
2. Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang mengatasi anggaran belum menunjang kinerja sektor pariwisata dengan Mendapatkan devisa (*national balance payment*) melalui pertukaran mata uang asing (*foreign exchange*). Devisa yang didapatkan dari pertukaran mata uang asing dapat memenuhi anggaran sektor pariwisata

Dalam mencapai tujuan pemberdayaan, berbagai upaya dapat dilakukan melalui berbagai macam strategi. Salah satu strategi yang memungkinkan adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang secara konseptual memiliki ciri-ciri unik serta sejumlah karakter sebagai berikut:

- 1) Pariwisata berbasis masyarakat menemukan rasionalitasnya dalam properti dan ciri-ciri unik dan karakter yang lebih unik diorganisasi dalam skala kecil, jenis pariwisata ini pada dasarnya merupakan, secara ekologis aman, dan tidak banyak menimbulkan dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis wisata konvensional,
- 2) Pariwisata berbasis komunitas memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek-obyek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil dan

---

<sup>44</sup> Wawancara pada tanggal 6 April 2022



olehkarena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal,

- 3) Berkaitan sangat erat dan sebagai konsekuensi dari keduanya lebih dari pariwisata konvensional, dimana komunitas lokal melibatkan diri dalam menikmati keuntungan perkembangan pariwisata, dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat.

Implementasi Kebijakan dari Sudut Pandang Pembuat Kebijakan Arah pembangunan pariwisata nasional adalah pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait pengembangan budaya bangsa (RPJPN 2005 – 2025). Terkait Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan arah pembangunan ini kemudian diterjemahkan oleh beberapa kementerian terkait dengan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

Prinsip dalam penyelenggaraan kepariwisataan antara lain memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; memberdayakan masyarakat setempat; dan menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

3. Upaya Pemerintah Kota Padang menanggulangi kebijakan pemerintah belum optimal melalui Rencana Strategis Kota Padang Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2019-2024 upaya program pariwisata yang berwawasan lingkungan dilakukan berdasarkan hal itu adalah:

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Setiap bentuk pengembangan pariwisata bertumpu pada dua elemen, yaitu destinasi dan pasar. Untuk dapat mengembangkan kedua aspek tersebut diperlukan upaya pemasaran. Pemasaran dengan menggunakan cara tradisional perlu diganti dengan pemasaran dengan teknologi modern seperti internet, leaflet, booklet sehingga dapat memperluas jangkauan pemasaran yang pada akhirnya meningkat jumlah wisatawan dan lama tinggal. Program pengembangan pemasaran bertitik berat pada Pembinaan Pusat Informasi Wisata (*Tourist Information Center*) yang dilengkapi teknologi modern.

Program pengembangan produk pariwisata ditujukan kepada pengesahaan dari perencanaan pariwisata Kota Padang. Dalam pengembangan pariwisata menjadi sangat penting untuk menyusun perencanaan, sebab tanpa perencanaan potensi kerusakan lingkungan di areal atau kawasan pariwisata dapat terjadi, sehingga dalam perencanaan disusun berdasarkan kondisi saat ini dengan membuat analisis waktu mendatang serta menentukan tujuan yang ingin dicapai dan memilih alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Legalitas perencanaan pariwisata ini disahkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga stakeholder mematuhi apa yang tercantum di dalam perencanaan tersebut.<sup>45</sup>

Dana pengembangan pemasaran sebagian dibiayai melalui APBN/APBD dengan kegiatan sebagai berikut::

1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri;
2. Pelaksanaan Tour de Singkarak ;

---

<sup>45</sup> PPIID.Padang.go.id. [https://ppid.padang.go.id/uploads/audios/ppidpadang\\_60c0196b35c58.pdf](https://ppid.padang.go.id/uploads/audios/ppidpadang_60c0196b35c58.pdf) (diakses pada tanggal 27 Mei 2022)

3. Pemilihan Duta Wisata dan Padang Fashion Festival;
4. Pembuatan Bahan-Bahan Promosi Pariwisata;
5. Seminar Kepariwisata;
6. Pekan Ekonomi Kreatif Kota Padang;
7. Pelaksanaan Ekraf Award Kota Padang;
8. Inventarisasi Produk Keraf Kota Padang;
9. Pengembangan Komunitas Ekraf Anak Muda Kota Padang;
10. Fasilitasi Kunjungan Media Luar Negeri;
11. Fasilitasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Padang;
12. Naskah Akademis Ranperda Halal Tourism dan Penyusunan Ranperda;
13. Sosialisasi Perwako/Ranperda Halal tourism

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata bertujuan untuk mengembangkan objek dan daya tarik wisata di Kota Padang. Sesuai dengan Visi dan Misi maka Program Pengembangan Objek dan daya tarik wisata adalah pembenahan wisata terpadu Gunung Padang yang meliputi Gunung Padang dengan Jembatan Siti Nurbaya, Pantai Air Manis dengan Legenda Batu Malin Kundang, dan Penataan Pantai Padang melalui sharing APBD Provinsi Sumatera Barat, masyarakat dan pihak swasta. Pengembangan objek dan daya tarik wisata ini akan menciptakan wisata keluarga yang nyaman dan berkesan serta mendorong pengembangan wisata konvensi.<sup>46</sup>

pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus berpegang pada 5 prinsip, yaitu:

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Diko Eka Putra Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Kota Padang pada tanggal 6 April 2022

1. Prinsip keseimbangan, bahwa pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil didasarkan pada komitmen pola keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan konservasi;
2. Prinsip partisipasi masyarakat, bahwa pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil melibatkan masyarakat dalam pengelolaan usaha pariwisata;
3. Prinsip konservasi, bahwa pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan (alam dan budaya). Pengembangan harus diselenggarakan secara bertanggung jawab dan mengikuti kaidah-kaidah ekologi serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat;
4. Prinsip keterpaduan, bahwa pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus direncanakan secara terpadu dengan memperhatikan ekosistem pulau dan disinergikan dengan pembangunan berbagai sektor;
5. Prinsip penegakan hukum, bahwa pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus dikembangkan sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Dalam pengembangan pariwisata tersebut diarahkan agar ada:

1. Penataan ruang yang jelas, yang dalam penyusunannya harus melalui proses konsultatif dengan para pihak, merupakan hasil kolaborasi masukan para pihak dengan perencana kawasan, dan memperhatikan aspek lingkungan (termasuk konservasi sumber daya alam dan sensitivitas ekosistem) serta aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, penyusunan dan penetapan zonasi diperlukan.

2. Pendekatan daya dukung (*carrying capacity*). Daya dukung diartikan sebagai kondisi maksimum suatu ekosistem untuk menampung komponen biotik (mahluk hidup) yang terkandung di dalamnya dengan juga memperhitungkan faktor lingkungan dan faktor lainnya yang berperan di alam.

Secara umum ragam daya dukung wisata meliputi:

- 1) daya dukung ekologis (merupakan tingkat maksimal penggunaan suatu pulau);
  - 2) daya dukung fisik (merupakan jumlah maksimum penggunaan atau kegiatan yang dapat diakomodir tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas); dan
  - 3) daya dukung sosial (merupakan batas tingkat maksimum dalam jumlah dan tingkat penggunaan yang akan menimbulkan penurunan dalam tingkat kualitas pengalaman atau kepuasan pengunjung).
3. Pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap menjaga aspek keberlanjutan, sehingga dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata dilakukan melalui studi AMDAL.
  4. Pengembangan pariwisata direncanakan dan dikembangkan secara ramah lingkungan dengan tidak menghabiskan atau merusak sumber daya alam dan sosial, namun dipertahankan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan.

Intervensi pemerintah terhadap pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk mengontrol dan memberikan incentive dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, seperti; aturan pemanfaatan lahan, membatasi akses wisatawan

terhadap daerah-daerah yang rawan terhadap kerusakan, melindungi budaya lokal, mengarahkan perilaku wisatawan yang berwawasan lingkungan, pembatasan dalam penggunaan energi, menghemat sumber alam yang langka, mengurangi polusi dan memberikan *incentive* terhadap pembangunan infrastruktur yang juga bermanfaat bagi host seperti sistem transportasi, perlindungan terhadap ruang hijau kota dan *national park*.<sup>47</sup>

Aspek pengembangan kebijakan dan perencanaan destinasi pariwisata, sebagai sisi penawaran, memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya pariwisata berbasis alam dan budaya menjadi hal penting untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan destinasi pariwisata berkelanjutan. Pendekatan spasial destinasi pariwisata sangat dibutuhkan untuk menunjang pariwisata berkelanjutan, hal tersebut sangat penting sebagai panduan pengelola destinasi pariwisata dalam menentukan pengembangan destinasi di masa yang akan datang.

Perancangan destinasi pariwisata menggunakan sistem informasi geografis bertujuan untuk memberikan wawasan kognitif berdasarkan unsur geografis, selain itu memiliki keterkaitan dalam mengidentifikasi pola perjalanan wisata dan dampak pariwisata dalam menunjang destinasi pariwisata berkelanjutan.<sup>48</sup> Pendekatan spasial dapat menyebarkan aktivitas wisatawan di destinasi pariwisata, sehingga memicu tersebarnya manfaat ekonomi pariwisata dalam bentuk penghasilan bagi masyarakat setempat.

---

<sup>47</sup> Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Achmad Sjafii Ni Made Ida Pratiwi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

<sup>48</sup> Shandra Rama Panji Wulung. Journal of Sustainable Tourism Research. Pendekatan Spasial Untuk Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan ISSN 2715 – 8004 Vol. 3, No. 2, Mei 2021: 68 - 73 <https://jurnal.unpad.ac.id/tornare/article/view/32657/15421>.

Pembangunan kepariwisataan di Kota Padang dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas sektoral agar pembangunan pariwisata dapat mencapai keberhasilan yang maksimal. Keberhasilan pembangunan juga tergantung dari daya tarik wisata, restoran, transportasi, dan insutri cendra mata. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata diperlukannya sebuah strategi yang akan dilakukan serta Kerjasama antara masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dari keseluruhan tahapan pembangunan, dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat punya kesadaran tinggi terhadap pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan pariwisata. Peningkatan sumber daya manusia berkaitan dengan pariwisata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesadaran wisata bagi msayarakat yang berkonsentrasi pada kesejahteraan dan pelayanan optimal yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan akan dapat dicapai jika tingkat pemanfaatan berbagai sumber daya tidak melampaui kemampuan regenerasi sumber daya tersebut. Agar tingkat pemanfaatan dapat terkendali, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di dalam setiap pembangunan kepariwisataan, antara lain : manfaat pembangunan ekonomi harus didistribusikan secara adil, dan mereka yang menderita harus mendapat prioritas lebih tinggi di

dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan termasuk di dalam menikmati manfaat ekonomi kepariwisataan.

Keterlibatan masyarakat hendaknya dikembangkan sejak awal perencanaan, penentuan tujuan rencana, penentuan kebijakan, dan dalam implementasi. Dengan keterlibatan masyarakat secara utuh, artinya menempatkan masyarakat lebih sebagai subjek dari pada objek, maka usaha melestarikan daerah tujuan wisata akan lebih mudah, dan pengawasan juga dilakukan bersama masyarakat, sehingga sistem tersebut berjalan dengan baik.

Setiap sektor melaksanakan fungsinya dengan baik dalam satu koordinasi kelembagaan. Pariwisata berkelanjutan dalam banyak hal tetap merupakan usaha untuk ajang kompetisi dan distribusi sumber daya yang terbatas, sehingga dalam hal ini, membutuhkan solusi politik. Adanya kesepakatan implementasi tolak ukur yang jelas dari pariwisata berkelanjutan dengan kebijakan berupa regulasi dan instrumen yang tepat. Keseimbangan harus dicapai antara pariwisata dan kegiatan yang ada dan potensi lainnya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Mekanisme yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang sudah sesuai dengan komponen yang harus dipenuhi dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu berkelanjutan secara lingkungan, berkelanjutan secara ekonomi, dan berkelanjutan secara sosial budaya yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Padang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang yaitu ;
  - a. Sumber Daya Manusia belum optimal
  - b. Anggaran belum menunjang kinerja sektor pariwisata
  - c. Kebijakan Pemerintah yang belum optimal.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Padang yaitu ;
  - a. Membuka lapangan kerja bagi penduduk lokal di bidang pariwisata seperti : tour guide, waiter, bell boy, dan lain-lain.
  - b. Mendapatkan Devisa melalui pertukaran mata uang asing
  - c. Pemerintah Kota Padang melalui Rencana Strategis Kota Padang Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2019-2024

## **B. Saran**

1. Agar pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat dan kebijakan perlu dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan dipatuhi seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Kebijakan harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, serta melibatkan masyarakat artinya menempatkan masyarakat lebih sebagai subjek dari pada objek, maka usaha melestarikan daerah tujuan wisata akan lebih mudah, dan pengawasan juga dilakukan bersama masyarakat, sehingga sistem tersebut berjalan dengan baik.
2. Agar masyarakat bekerja sama dengan pemerintah melalui kebijakan pariwisata di Kota Padang agar lebih berkembang dan maju sesuai dengan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Kota Padang 2019-2024.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU-BUKU

- Achmad, Yulianto dan Fajar,Mukti. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fandeli. 1995. *Pengertian dan Kerangka Dasar Kepariwisataaan Pengertian*. Yogyakarta: Liberty.
- Gamal Suwanto. 1997. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Musanef . 2006. *Manajemen Pariwisata di Indonesia*. Jakarta: Gunung Harta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*: Jakarta: Raja Grafindo.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metode Penelitian Hukum*,Jakarta: RajaGrafindo Persada.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang 2004-2020;
- Peraturan Walikota Padang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

### C. SUMBER LAIN

- Rencana Strategis Kota Padang Tahun 2019-2024.
- Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025
- Basis Data Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.com, *Profil Kota Padang*, <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/81>

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.co.id., *Jurnal Kepariwisataaan Indonesia, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataaan Indonesia*, (E-ISSN 2685-9076; P- ISSN 1907-9419 Volume 4, Nomor 12 ). <http://ejournal.kemendparekraf.go.id/index.php/jki>

BPS.co.id., *Ringkasan APBD Pendapatan Kabupaten Kota Se-Sumatera Barat*, <https://sumbar.bps.go.id/indicator/13/324/1/ringkasan-apbd-pendapatan-kabupaten-kota-se-sumatera-barat.html>

Adi Kurnia, *Telaah Proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dalam Perspektif Manajemen Strategis (Penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya)*, e-ISSN 2614- 2945 Volume 7 Nomor 2, Bulan Agustus Tahun 2020.

Sunawan, *Kebijakan Pembangunan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul*, Volume 1, Nomor 9 Tahun 2019. <http://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/42/38>

Arini Permata Sari, *Analisa Konsep Perencanaan Strategis*, Volume 2 Nomor IX Tahun 2017. <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/viewFile/27/8>

Rusniati dan Ahsanul Haq, *Perencanaan Strategis Dalam Perspektif Organisasi*, Tahun XIV, No. 2, Nopember 2014 : 102 - 209. <file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/skripsi%20ivan/178-333-1-10-20150227.pdf>